

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pariwisata merupakan sektor yang sedang dikembangkan di Kabupaten Belitung, berbagai daerah dengan potensi wisata turut dikembangkan demi kemajuan dalam sektor pariwisata. Tempat wisata yang baru atau lama terus dikembangkan oleh pemerintah baik itu milik daerah atau swasta. Salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan adalah Pantai Tanjung Tinggi.

Pantai Tanjung Tinggi merupakan wisata alam dan sudah lama dibuka oleh Pemerintah daerah, tetapi dalam upaya untuk mengembangkan kawasan mengalami hambatan karena terjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pembangunan. Pengelolaan pantai dipegang oleh PT.Ranati setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah daerah. Pengelolaan dan pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai kawasan wisata lambat dilakukan karena terjadi konflik didalamnya.

Konflik yang terjadi di pantai Tanjung Tinggi bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah terjadi konflik antara pedagang dengan PT.Ranati, awalnya pedagang diberikan izin untuk berjualan di pantai tetapi tidak berapa lama PT.Ranati meminta pedagang untuk pindah karena akan dilakukan pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi. Awalnya pedagang tidak mau untuk

pindah tetapi setelah dilakukan musyawarah mereka sepakat bahwa pedagang akan direlokasi ketempat yang baru.

Terhitung sudah 2 tahun dilakukan pembebasan lahan, hingga saat ini belum ada pembangunan dilakukan dan para pedagang pun kembali berjualan di sepanjang Pantai Tanjung Tinggi. Hal ini menjadi konflik baru karena kembalinya pedagang membuat kawasan pantai tidak tertata dengan rapi, pemerintah daerah pun gencar melakukan penertiban di Pantai Tanjung Tinggi tetapi ini tidak memberikan dampak apapun. Pedagang tetap terus berjualan karena belum ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh PT.Ranati, ini semakin mempersulit pemerintah untuk merapikan kawasan pantai.

Konflik yang terjadi tidak sebatas itu saja, satu tahun sebelumnya berdiri Restoran Lemadang yang berlokasi di ujung Pantai Tanjung Tinggi, banyak pihak yang memperdebatkan berdirinya restoran tersebut. Bappeda yang mengawasi pembangunan menyatakan bahwa bangunan tersebut dimiliki oleh PT.Ranati. Pembangunan restoran juga melanggar salah satu peraturan daerah yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana tempat berdirinya Restoran Lemadang masih memasuki kawasan lindung sempadan pantai. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Ranati tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, hal ini semakin membuat pedagang tetap untuk terus berjualan. Berdirinya restoran tersebut menambah alasan pedagang untuk terus berjualan di Pantai Tanjung Tinggi.

Pedagang juga tidak menyukai adanya Restoran Lemadang di Pantai Tanjung Tinggi, karena berdirinya restoran tidak mempunyai izin yang sah bahkan dari kepala Desa Tanjung Tinggi. Pedagang merasa dirugikan karena orang dari luar desa diperbolehkan untuk berjualan sedangkan mereka tidak. Menetapnya pedagang di kawasan pantai membuat Pantai Tanjung Tinggi terlihat kumuh, pemerintah daerah juga tidak bisa menertibkan karena mereka akan terus kembali, sedangkan PT.Ranati belum melakukan pembangunan fisik di kawasan tersebut semakin mempersulit dan menghambat perkembangan wisata Pantai Tanjung Tinggi.

Konflik yang terjadi dalam pengembangan dan pengelolaan Pantai Tanjung Tinggi sebagai kawasan wisata cukup rumit, setiap satu permasalahan diikuti juga dengan permasalahan lainnya. Pihak yang berkonflik juga lebih dari satu dan membuat masalah ini sulit untuk diselesaikan.

## **B. Implikasi Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Segitiga Konflik Galtung, dalam sebuah konflik terdiri dari tiga dimensi yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi yang terbentuk menjadi sebuah segitiga (*triangel*). Pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai kawasan wisata mengalami hambatan karena terjadi konflik dalam pengelolaan dan pembangunan. Pihak-pihak yang berkonflik mempunyai sikap yang berbeda dalam menghadapi permasalahan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

perilaku dimana perilaku yang diwujudkan saling bertentangan satu sama lain dan pada akhirnya akan menciptakan kontradiksi.

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh PT. Ranati yang lambat dalam menangani pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi, sehingga membuat pedagang liar kembali masuk dan berjualan di area pantai. Kembalinya pedagang di Pantai Tanjung Tinggi direspon oleh pemerintah daerah. Pemerintah melarang pedagang untuk berjualan karena mengganggu kenyamanan wisatawan dan membuat kawasan pantai terlihat tidak rapi. Bahkan PT. Ranati juga melarang pedagang untuk berjualan, tetapi pedagang tidak memperdulikan peringatan tersebut.

Ditambah berdirinya Restoran Lemadang di ujung pantai semakin memperkuat alasan pedagang untuk tetap berjualan, karena berdirinya restoran tersebut melanggar aturan dan tidak ada izin dari desa. Sikap pemerintah daerah juga mengabaikan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PT. Ranati yang membangun restoran tersebut.

Sikap yang ditunjukkan oleh tiap pihak dapat dilihat dari perilaku yang timbul, pedagang bersikeras untuk tetap berjualan meski sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Perilaku pedagang ini muncul sebagai akibat karena lambatnya pembangunan yang dilakukan oleh PT. Ranati, pedagang akan terus menetap berjualan dipantai hingga pembangunan benar-benar dilakukan. Pedagang juga kesal dengan PT. Ranati yang mendirikan Restoran

Lemadang secara tidak sah, serta sikap pemerintah daerah yang tidak memperdulikan nasib mereka.

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pihak yang berkonflik akhirnya menciptakan kontardiksi sebagai puncak konflik tersebut. Terjadinya perdebatan antara pedagang dengan PT. Ranati karena membangun Restoran Lemadang diujung pantai sedangkan pedagang tidak diperbolehkan untuk berjualan, lalu perdebatan antara PT.Ranati dengan Bappeda memperlakukan pelanggaran peraturan daerah karena membangun restoran di dalam kawasan lindung sempadan pantai. Tidak hanya itu terjadi juga konflik antara pedagang dengan pemerintah daerah terutama Satpol PP karena terus melakukan razia bahkan menyita barang dagangan mereka dan membakar tempat pedagang berjualan. Konflik yang terjadi dalam pembangunan Pantai Tanjung Tinggi menjadi salah satu penghambat berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung.

Segitiga konflik yang dikemukakan oleh Galtung menghasilkan 3 bentuk kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan budaya. Konflik yang terjadi dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi juga menghasilkan 2 bentuk kekerasan yaitu kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Kekerasan struktural diterima oleh pedagang liar yang berjualan karena tidak mempunyai izin yang sah baik dari pemerintah daerah juga dari PT. Ranati. Kekerasan langsung juga diterima oleh pedagang ketika dilakukan razia oleh Satpol PP, terjadi juga perdebatan atau adu mulut bahkan

barang dagangan milik pedagang disita dan tempat berjualan pun dibakar oleh Satpol PP.

Ketika terjadinya konflik tentu akan ada dampak yang dirasakan oleh pihak yang terlibat, dalam permasalahan ini pihak yang mendapat lebih banyak dampak adalah pedagang yang hampir semuanya merupakan penduduk desa Tanjung Tinggi dan bermata pencaharian sebagai pedagang. Dampak yang diterima pun secara struktural dan langsung.

### **C. Saran**

Pembangunan yang akan dilakukan di Pantai Tanjung Tinggi adalah bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung. Adanya pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi juga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat juga wisatawan yang datang. Oleh karena itu perlu adanya himbauan kepada semua pihak yang ikut serta membangun dan masyarakat di Kabupaten Belitung :

1. PT. Ranati diharapkan untuk segera melakukan pembangunan di Pantai Tanjung bertujuan agar pembangunan di pantai cepat terealisasi. PT. Ranati juga diharapkan dapat menuruti peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan berlaku di kawasan Pantai Tanjung Tinggi agar nantinya tidak menimbulkan konflik baru.
2. Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus mengawasi dan mengontrol arahnya pembangunan di berbagai sektor yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah juga harus bisa menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran

dan tidak membiarkan begitu saja, serta dapat bersikap adil kepada semua pihak.

3. Pedagang yang berjualan disekitar pantai diharapkan menuruti dan mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan pemilik lahan. Jika pedagang ingin tetap berjualan maka harus bisa mentaati peraturan yang diberikan, agar nantinya tidak menciptakan konflik baru.
4. Masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dapat membantu pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan dan melaporkan kepada pemerintah jika terjadi pelanggaran. Masyarakat dan pemerintah daerah dapat saling membantu dan bekerjasama dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Belitung

